



Dr. K.H. Hilmy Muhammad, M.A., dan Drs. Sukarjo, M.Pd., memberikan sambutan

SOLUSI UNTUK KEMAJUAN

Evaluasi Program Lembaga Pendidikan Ma'arif NU DIY: Menuju Kemandirian dan Kualitas Pendidikan yang Lebih Baik

Ma'News – Yogyakarta – 21/11/2024 – Di tengah gempuran perubahan dalam dunia pendidikan, Pengurus LP Ma'arif NU DIY beserta Kepala Sekolah SLTA Ma'arif NU DIY menggelar evaluasi program di Gedung DPD RI DIY. Acara ini menjadi forum penting bagi para kepala sekolah dan pengurus LP Ma'arif NU PWNU DIY untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi.

Dr. K.H. Hilmy Muhammad, M.A., dalam sambutannya, mengungkapkan kesulitan yang dihadapi oleh kepala sekolah. Penegakkan disiplin akan menjadi kunci utama. Disiplin yang tinggi, baik dari kepala sekolah maupun guru, akan melahirkan prestasi yang gemilang. Menurutnya, evaluasi program merupakan langkah krusial untuk memastikan kelangsungan sekolah di tengah arus perubahan yang dinamis.

Drs. Sukarjo, M.Pd., pengurus LP Ma'arif NU PWNU DIY Divisi SMA dan SLB yang mewakili Ketua LP Ma'arif NU PWNU DIY, juga menekankan pentingnya evaluasi. Perlu untuk mengevaluasi sejauh mana program yang telah dijalankan berhasil. Ia mengingatkan tentang perubahan menteri dan pentingnya Ma'arif NU DIY untuk memiliki pegangan yang kuat dalam menghadapi program dari pemerintah kedepannya. Beliau juga menegaskan bahwa perlunya komitmen tinggi bagi kepala sekolah untuk bisa mengelola sekolahnya dengan baik.



Dr. Pujiriyanto, M.Pd., M. Luqman Hakim, M.Pd., Dra. Ening Yuni A., M.A., dan Nanik Suhartati, S.Pd., menyampaikan laporan kegiatan

Evaluasi program SLTA Ma'arif NU DIY di Gedung DPD RI DIY tidak hanya berfokus pada internal sekolah, namun juga menyerap informasi dan inspirasi dari berbagai kegiatan eksternal. Sesi laporan dari pengurus yang mewakili Ketua pada berbagai acara dan kegiatan menjadi bagian penting dalam evaluasi ini.

M. Luqman Hakim, M.Pd., dari Divisi Akreditasi, dalam laporannya, mengikuti Simposium Pesantren 2024 di FISIPOL UGM. Simposium tersebut bertujuan untuk memetakan isu-isu strategis di pondok pesantren. Isu yang dibahas sangat relevan, seperti peran pesantren dalam pendidikan, pemetaan pesantren sebagai pusat dakwah, dan pesantren sebagai pemberdayaan masyarakat. Ia menambahkan bahwa simposium ini juga menyinggung tantangan utama pesantren di era saat ini, di antaranya adaptasi pesantren dalam perubahan sosial dan kurangnya infrastruktur. Harapnya, acara ini bisa menguatkan peran pesantren ke depan.

Dra. Ening Yuni A., M.A., dalam laporannya, menjelaskan partisipasinya dalam kegiatan bedah buku "Dari Aborsi Sampai Childfree: Bagaimana Mubadalah Berbicara" di UNU Yogyakarta. Isu-isu yang dibahas sangat penting dan relevan dengan konteks kehidupan masyarakat saat ini. Isu yang diangkat meliputi hukum keluarga, adopsi, dan KDRT.

Sementara itu, Dr. Pujiriyanto, M.Pd., menjelaskan kontribusi LPMNU DIY dalam mengusut kasus penusukan santri. Siswa-siswi LPMNU DIY ikut berkontribusi dalam mendesak Polda DIY untuk mengusut kasus tersebut. Ia juga menambahkan bahwa aksi yang dilakukan diikuti oleh sekitar 10.000 orang dari berbagai komponen.

Laporan terakhir disampaikan oleh Nanik Suhartati, S.Pd., menjelaskan partisipasinya dalam Webinar Series dengan tema "Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak berbasis Keluarga" yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Pendudukan melalui Zoom Meeting. Terdapat 1.187 kasus kekerasan dalam keluarga di DIY. Ia menambahkan bahwa faktor ekonomi dan pendidikan menjadi penyebab utama kekerasan. Masyarakat harus memiliki kesadaran bersama dalam upaya pencegahan kekerasan.

Sesi laporan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi pendidikan dan perkembangan sosial saat ini. Informasi yang didapat menjadi bahan renungan dan evaluasi bagi SLTA Ma'arif NU DIY untuk merumuskan strategi yang lebih baik dalam mendidik generasi muda yang berakhlak mulia dan mampu menghadapi tantangan masa depan.



Dr. Tadkiroatun Musfiroh, M.Hum., ketika memimpin jalannya evaluasi program

Puncak acara evaluasi program LP Ma'arif NU DIY di Gedung DPD RI DIY dipimpin langsung oleh Dr. Tadkiroatun Musfiroh, M.Hum., selaku Ketua LP Ma'arif NU PWNU DIY. Sesi ini membahas secara mendalam berbagai isu strategis yang dihadapi oleh LP Ma'arif NU DIY, dan merumuskan solusi konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Ma'arif NU DIY ke depannya.

DPS: Membangun Komitmen dan Peran Aktif

Evaluasi mengungkapkan kurangnya aktivitas Dewan Pembina Sekolah (DPS) dalam menjalankan tugasnya. "Minimnya sidang dan laporan, belum mengajukan perpanjangan DPS, dan belum punya komitmen yang kuat terhadap satuan pendidikan menjadi masalah utama," papar Dr. Tadkiroatun. Ia menambahkan bahwa DPS juga belum terbiasa atau belum kenal dengan tugasnya, dan satuan pendidikan belum memfasilitasi dengan baik.

Solusi yang dirumuskan adalah restrukturisasi keanggotaan DPS, pemilihan DPS yang mempertimbangkan jarak sekolah dan tempat tinggal DPS, serta penyamaan persepsi DPS tentang perannya dalam menjalankan tugas.

Pengajuan Pengajuan BCKS-CKS-BCKAMAD-CKAMAD

Masalah lain yang dibahas adalah proses pengajuan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS). "Ada kepala sekolah yang mengajukan perpanjangan SK atas dirinya sendiri, surat pengajuan DPS telat sampai ke Ketua LPM, dan BCKS yang diajukan tidak sesuai syarat," ungkap Dr. Tadkiroatun. Selain itu, hubungan antara kepala sekolah dan DPS tidak harmonis, DPS dan kepala sekolah tidak paham prosedur, dan tidak ada BCKS yang memenuhi syarat.

Solusi yang ditemukan adalah penegakan aturan, penegakan protokoler organisasi, penyiapan 3-5 kader yang potensial untuk menjadi BCKS, dan menjamin hak yang sama bagi semua BCKS terkait dengan P3K di jalur resmi.

Mutu SDM: Meningkatkan Profesionalitas Guru

Masalah mutu SDM guru juga menjadi perhatian utama. "Idealnya, guru wajib mengikuti PKB, ada piramida penurunan mutu pendidikan, perubahan kurikulum, dan bantuan ke MGMP cukup deras," papar Dr. Tadkiroatun. Namun, kenyataannya, 80% guru tidak aktif mengikuti MGMP, MGMP belum dijadwalkan oleh kepala sekolah, 10% SDM guru nonkualifikasi, dan 20% nonmatch. Hal ini disebabkan oleh SDM guru yang rendah, kepala sekolah tidak memiliki daya dukung yang cukup, dan peningkatan mutu menjadi beban guru.

Solusi yang ditemukan adalah melakukan veto terhadap skor kinerja PKB, menjadwalkan MGMP secara teratur oleh kepala sekolah, tidak menetapkan guru SLTA tamatan SLTA, mendirikan Komunitas Belajar di masing-masing sekolah, dan memberikan tambahan skor penilaian guru bagi ketua Komunitas Belajar.

Kaderisasi: Memperkuat Identitas dan Membangun Kekuatan Aswaja

Idealnya, setiap guru dan tenaga kependidikan (GTK) di SLTA Ma'arif NU DIY adalah kader NU, sekaligus menjadi promotor budaya Aswaja sebagai ciri khas lembaga pendidikan NU. Namun, kenyataannya, 27% GTK bukan kader NU, 90% tidak menjadikan Aswaja sebagai unggulan dalam proses pendidikan, dan 96% belum mendapatkan pendidikan kader. Hal ini disebabkan oleh kekurangan syarat keanggotaan NU dalam penerimaan GTK, keterbatasan capaian ideologis-spiritual GTK, dan prioritas pendidikan kader yang belum tercapai.

Solusi yang ditemukan adalah menjadikan keanggotaan NU sebagai syarat penerimaan GTK, wajib mengikuti PKPNU bagi semua kepala sekolah, guru, dan karyawan, serta wajib menyelenggarakan program syariah-amaliyah Aswaja di sekolah.

Sumber Keuangan: Memperkuat Kemandirian dan Efisiensi

Lembaga pendidikan idealnya memiliki sumber keuangan yang kuat dan berkelanjutan. Satuan pendidikan harus mampu mengelola sumber pendapatan internal secara efektif dan berkelanjutan. Namun, kenyataannya, income internal sangat terbatas, banyak keuangan satuan pendidikan yang "lari keluar," dan manajemen masih fokus pada pembelanjaan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan menarik SPP-BP3 secara normal, tidak adanya unit usaha yang menghasilkan, dan kekurangan sentuhan akuntabilitas.

Solusi yang dirumuskan adalah mendirikan unit usaha di LPM dan satuan pendidikan, dengan mendukung pelatihan pengelolaan unit usaha. Peningkatan kolaborasi dengan mitra dan peran LPM sebagai leader juga diharapkan dapat meningkatkan income dan kemampuan pengelolaan keuangan.

Kepegawaian: Menata Sistem dan Meningkatkan Kesejahteraan

Sistem kepegawaian yang baik menjamin stabilitas dan kinerja pegawai. Idealnya, terdapat aturan kepegawaian lengkap, sistem penggajian yang terstruktur, standar honor dan gaji guru LPM, serta tidak ada disparitas dan double counting. Namun, kenyataannya, aturan kepegawaian dan sistem penggajian LPM masih kurang lengkap, honor dan gaji guru LPM rendah, dan terdapat kesenjangan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh kesibukan pengurus, prioritas LPM yang belum terfokus, variasi income satuan pendidikan yang rendah, dan kurangnya kesadaran kepala sekolah terhadap rendahnya gaji guru.



Foto Kepala Sekolah SLTA Ma'arif NU DIY dalam suasana evaluasi program

Solusi yang dirumuskan adalah menjadikan aturan kepegawaian sebagai program unggulan, standardisasi sistem penggajian fleksibel, penataan pegawai dimulai dengan pemetaan.

Masalah Ijazah: Membantu Siswa dan Meningkatkan Kemandirian

Masalah penahanan ijazah merupakan persoalan serius yang menyeret banyak lembaga pendidikan. Idealnya, ijazah diambil pada waktu yang ditentukan, ada subsidi silang dan beasiswa prestasi untuk membantu siswa yang kurang mampu, dan sistem pembayaran SPP-BP3 berjalan lancar. Namun, kenyataannya, banyak ijazah yang tidak diambil oleh siswa, subsidi dan beasiswa terbatas, dan ada tunggakan SPP-BP3 yang tidak terlacak secara sistematis. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi orang tua yang kurang mampu, jejaring donasi dan program LazisNU yang belum optimal, dan metode income yang belum diterapkan secara efektif.

Solusi yang ditawarkan adalah Perjanjian antara sekolah dan orang tua siswa di awal pendaftaran akan menjelaskan dengan jelas tentang sistem pembayaran SPP-BP3 dan konsekuensi dari penunggakan. Pengusulan beasiswa berprestasi melalui jejaring dan program LazisNU. Hal ini diharapkan dapat membantu siswa yang berprestasi tetapi kurang mampu.

Terakhir, Ketua LP Ma'arif NU PWNU DIY, Dr. Tadkiroatun Musfiroh, M.Hum., menekankan pentingnya PKB-MGMP sebagai kunci peningkatan mutu guru dan sekolah, serta pengembangan unit usaha LPM untuk mendukung keuangan sekolah. Ia juga mengungkapkan visi jangka panjang untuk semua sekolah Ma'arif NU DIY, yaitu meningkatkan daya saing lembaga melalui empat aspek penting: mutu sebagai daya tawar, kemandirian sebagai daya bayar, kesejahteraan dan keadilan sebagai daya ikat, dan ideologi dan spiritualisme sebagai daya ikat. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan sekolah-sekolah Ma'arif NU DIY dapat terus berkembang dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berakhlak mulia untuk mencerdaskan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang lebih baik.



Foto bersama Ketua LP Ma'arif NU PWNU DIY dan Kepala Sekolah SLTA Ma'arif NU DIY